

ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR KOTA DUMAI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Caska

Pusat Penelitian Kependudukan/Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau
Jalan HR. Subrantas KM 12,5 Simpang Panam Pekanbaru Indonesia 28293
e-mail: riodirgantoro@yahoo.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kondisi pendidikan dasar; dan (2) kebijakan pendidikan dasar. Metode yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik analisis gap (perbedaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, kondisi pendidikan dasar di Kota Dumai secara umum dalam kondisi baik tetapi ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam implementasinya; *kedua*, arah kebijakan pendidikan dasar di Kota Dumai untuk lima tahun ke depan dalam rangka mempersiapkan kawasan ekonomi khusus diarahkan pada: (1) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan (3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan dasar, kawasan ekonomi khusus

BASIC EDUCATION POLICY DIRECTION DUMAI CITY AS A SPECIAL ECONOMIC ZONE

ABSTRACT. This study aims to determine: 1) the condition of basic education and (2) basic education policy. The method used is survey method with a gap analysis technique (difference). The results showed that: first, basic education conditions in the city of Dumai in general in good condition but there are some that need to be improved in its implementation; second, basic education policy directions in Dumai City for the next five years in order to prepare a special economic zone aimed at: (1) equality of education opportunity getting; (2) improving quality, relevance and competitiveness of education; and (3) corporate governance, accountability and public imaging.

Key Words: basic education policy, special economic zone

PENDAHULUAN

Kota Dumai yang mempunyai posisi strategis bila dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini disebabkan karena Kota Dumai terletak pada kawasan Selat Malaka dan memiliki peranan penting sebagai penghubung antar daerah baik secara nasional maupun internasional. Di samping itu, Kota Dumai telah didukung dengan telah tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur jaringan transportasi darat lokal maupun regional, pelabuhan bertaraf internasional serta bandara (Bapeda Kota Dumai, 2008).

Bila ditetapkannya Kota Dumai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan akan semakin memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan karena kegiatan penanaman modal asing, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Pedoman yang dikeluarkan Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (Departemen Perindustrian, 2006): lokasi yang akan dipilih menjadi KEK minimal harus memenuhi kriteria ekonomi sebagai berikut: (1) terletak dijalur perdagangan internasional dan atau

alur laut utama di Indonesia; (2) Terdapat pasar potensial berskala internasional; (3) Bagian dari wilayah yang memiliki sumberdaya alam dan atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional; dan (4) Ketersediaan tenaga kerja lokal, baik jumlah maupun kualitas.

Untuk melihat ketersediaan tenaga kerja lokal dapat dilihat dari berbagai cara dan metode. Salah satu cara yang paling mudah walaupun banyak kelemahannya adalah bagaimana capaian pendidikan yang telah dilakukan di wilayah tersebut. Terlepas dari capaian pendidikan yang ada, yang perlu dilikakukan adalah membuat arah kebijakan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini ingin mengeksplorasi capaian pendidikan menurut pendapat masyarakat pengguna dan pelaku pendidikan. Setelah diketahui posisi capaian pendidikan maka disusun sebuah arah kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan harapan kebutuhan dari sebuah daerah yang dijadikan kawasan ekonomi khusus

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kondisi pendidikan dasar di Kota Dumai ? dan (2) Bagaimana arah kebijakan pendidikan dasar Kota Dumai yang sesuai dengan tuntutan sebuah kawasan ekonomi khusus ?

Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui kondisi pendidikan dasar di Kota Dumai dilihat dari capaian satuan pendidikan SD/MI dsn SMP/MTs; dan (2) untuk mengetahui arah kebijakan pendidikan dasar Kota Dumai yang sesuai dengan tuntutan sebuah kawasan ekonomi khusus.

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah Kota Dumai untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam menentukan arah kebijakan

pendidikan dasar yang sesuai dengan tuntutan sebuah kawasan ekonomi khusus. Secara spesifik keluaran yang dihasilkan adalah: (1) Bagi pemerintah daerah dapat melahirkan arah kebijakan pendidikan dasar yang sesuai dengan tuntutan sebuah kawasan ekonomi khusus; (2) Dapat menentukan program prioritas pengembangan pendidikan dasar di Kota Dumai.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey di seluruh kecamatan (5 kecamatan) Kota Dumai.

Teknik Pengumpulan Data

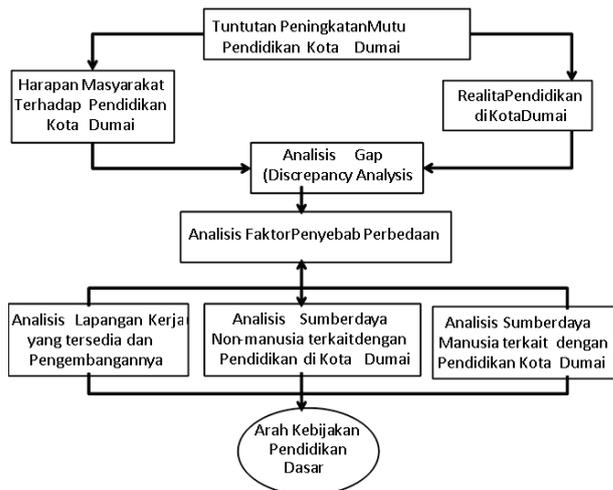
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara mendalam. Selain data primer juga digunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Kantor Camat dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan. Data sekunder ini dikonfirmasi dengan informasi dan data primer yang didapatkan di tingkat lapangan.

Responden dalam penelitian ini adalah 1) Camat sebanyak 5 orang, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan sebanyak 5 orang, Kepala Sekolah sebanyak 29 orang, Guru sebanyak 29 orang, Siswa sebanyak 87 orang, dan Orang Tua Siswa sebanyak 58 orang.

Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis gap (*discrepancy analysis*) antara harapan masyarakat atas pendidikan Kota Dumai selaras dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan dibanding dengan realita pendidikan Kota Dumai saat ini.

Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatan penelitian ini, diilustrasikan pada Gambar 1.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan Dasar Kota Dumai

Untuk melihat kondisi pendidikan dasar Kota Dumai dapat dilihat pada tabel

1 tentang Penilaian Responden Terhadap Kondisi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan tabel 2 tentang Penilaian Responden Terhadap Kondisi Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Tabel 1. Penilaian Responden Terhadap Kondisi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kota Dumai Tahun 2009

No	Indikator	SD/MI	
		Hasil Penilaian	Interpretasi
1.	Kepemilikan Tanah dan bangunan	90% milik sendiri tetapi tidak bisa menunjukkan sertifikat	Kepemilikan Tanah dan bangunan sudah baik tetapi perlu legalitas kepemilikan dalam bentuk sertifikat tanah dan bangunan
2.	Visi dan misi serta karakteristik khusus sekolah	75% telah memiliki	Visi dan misi serta karakteristik khusus sekolah sudah baik tetapi implementasinya masih perlu diselaraskan.
3.	Jumlah siswa rata-rata per kelas	rata-rata 28/kelas	Sudah baik
4.	Rasio guru dengan siswa	1:28	Sudah baik
5.	Memiliki staf (tenaga non guru)	92%	Sudah baik perlu spesialisasi
6.	Jumlah siswa rata-rata per sekolah	rata-rata 8 kelas per sekolah	Sudah baik
7.	Angka Partisipasi Murni (APM)	91%	Sudah baik
8.	Persentase Kelulusa	98,3%	Sudah baik
9.	Persentase Melanjutkan ke SMP/MTs	70,2%	Sudah baik

No	Indikator	SD/MI	
		Hasil Penilaian	Interpretasi
10.	Kinerja Kepala Sekolah	83,70,2%	Sudah baik
11.	Pemilikan kurikulum	Kurikulum nasional sebesar 88,9% kurikulum lokal sudah 90%	Baik kurikulum nasional maupun lokal sudah tersedia tetapi perlu perbaikan implementasi agar pelaksanaan sesuai dengan tuntutan kurikulum
12.	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah	63%	Masih perlu peningkatan perbaikan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.
13.	Guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (BPM)	66,2%	Masih perlu perbaikan pelaksanaan PBM
14.	Guru berkualifikasi S-1 Guru berkualifikasi Diploma	S-1 sebesar 35%	Masih perlu perbaikan kualifikasi guru, untuk SD/MI harus memenuhi kualifikasi S-1 PGSD
15.	Kelengkapan Sarana dan prasarana.	57,9%	Masih perlu ditingkatkan
16.	Kelengkapan perabotan	51,9%	Masih perlu ditingkatkan
17.	Kelengkapan Media pendidikan	50,0%	Masih perlu ditingkatkan
18.	Kelengkapan buku ajar	52,0%	Masih perlu ditingkatkan
19.	Kelengkapan ruang kepala sekolah	57,3%	Masih perlu ditingkatkan
20.	Kelengkapan ruang guru	58,9%	Masih perlu ditingkatkan
21.	Kelengkapan sarana jamban	52,0%	Masih perlu ditingkatkan
22.	Kelengkapan Sarana bermain	43,3%	Masih perlu ditingkatkan
23.	Tingkat kehadiran guru	97,6%	Sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi
24.	Ketersediaan dana investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan	63%	Masih perlu ditingkatkan
25.	Kondisi budaya sekolah	52,5%	Masih perlu ditingkatkan

Sumber: Data hasil survey tahun 2009

Tabel 2. Penilaian Responden Terhadap Kondisi Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) Di Kota Dumai Tahun 2009

No	Indikator	SMP/MTS	
		Hasil Penilaian	Interpretasi
1.	Kepemilikan Tanah dan bangunan	95% milik sendiri tetapi tidak bisa menunjukkan sertifikat	Kepemilikan Tanah dan bangunan sudah baik tetapi perlu legalitas kepemilikan dalam bentuk sertifikat tanah dan bangunan
2.	Visi dan misi serta karakteristik khusus sekolah	100% telah memiliki	Visi dan misi serta karakteristik khusus sekolah sudah baik tetapi implementasinya masih perlu diselaraskan.
3.	Jumlah siswa rata-rata per kelas	rata-rata 35/kelas	Sudah baik
4.	Rasio guru dengan siswa	1:28	Sudah baik
5.	Memiliki staf (tenaga non guru)	97%	Sudah baik perlu spesialisasi
6.	Jumlah siswa rata-rata per sekolah	rata-rata 3 kelas per sekolah	Sudah baik
7.	Angka Partisipasi Murni (APM)	91%	Sudah baik
8.	Persentase Kelulusan	87,3%	Sudah baik
9.	Persentase Melanjutkan ke SLTA	70,2%	Sudah baik
10.	Kinerja Kepala Sekolah	84,6%	Sudah baik
11.	Pemilihan kurikulum	kurikulum nasional sebesar 100% kurikulum lokal sudah 100%	Baik kurikulum nasional maupun lokal sudah tersedia tetapi perlu perbaikan implementasi agar pelaksanaan sesuai dengan tuntutan kurikulum
12.	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah	65%	Masih perlu peningkatan perbaikan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.
13.	Guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (BPM)	64,2%	Masih perlu perbaikan pelaksanaan PBM
14.	Guru berkualifikasi S-1	S-1 sebesar 69%.	Masih perlu perbaikan kualifikasi guru, untuk SMP/MTs

No	Indikator	SMP/MTS	
		Hasil Penilaian	Interpretasi
			harus memenuhi kualifikasi S-1 sesuai dengan bidang studi
15.	Kelengkapan Sarana dan prasarana.	58,3%	Masih perlu ditingkatkan
16.	Kelengkapan perabotan	53,4%	Masih perlu ditingkatkan
17.	Kelengkapan Media pendidikan	48,0%	Masih perlu ditingkatkan
18.	Kelengkapan buku ajar	53,0%	Masih perlu ditingkatkan
19.	Kelengkapan ruang kepala sekolah	58,5%	Masih perlu ditingkatkan
20.	Kelengkapan ruang guru	57,2%	Masih perlu ditingkatkan
21.	Kelengkapan sarana jamban	53,0%	Masih perlu ditingkatkan
22.	Kelengkapan Sarana bermain	42,7%	Masih perlu ditingkatkan
23.	Tingkat kehadiran guru	94,6%	Sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi
24.	Ketersediaan dana investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan	61%	Masih perlu ditingkatkan
25.	Kondisi budaya sekolah	54,5%	Masih perlu ditingkatkan

Sumber: Data hasil survey tahun 2009

Arah Kebijakan Pendidikan Dasar

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar di Kota Dumai untuk lima tahun ke depan dalam rangka mempersiapkan kawasan ekonomi khusus diarahkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan. Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan terutama pada: (1)Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan bagi anak usia dini, perintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jenis kelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.

Pemerataan pelayanan kelembagaan pendidikan dasar dalam rangka merintis wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, maka yang perlu dilakukan adalah pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Pemerataan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, MI-MTs satu ian SMP-MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan

hidup dan entrepreneur, serta penerapan teknologi dasar; (2) Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu; (3) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan; (4) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; (5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; (6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; (7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan dalam proses pembelajaran dan pelatihan pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui program: (1) Penguatan relevansi muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; (2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan; (3) Peningkatan kemampuan dan intensitas

pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; (4) Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; (5) Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; (6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tutor/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; (7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan; (8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.

Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Aspek ini masih berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yang memadai. Dalam hal ini harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifat pengembangan dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunan pendidikan.

a. Perencanaan dan Program

Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada penguatan pelayanan sistem perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih aspiratif dan partisipatif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Pendidikan; (2) Penguatan rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan pada setiap satuan pendidikan; (3) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana pendidikan; (4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan.

b. Organisasi Pelaksanaan Program

Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan kinerja dan produktivitas pelayanan organisasi pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan; dan (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan.

c. Pengawasan dan Pengendalian Program

Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan; (2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan; dan (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan.

d. Evaluasi Program

Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem penilaian pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program

Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan; (2) Penguatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan; (2) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggungjawaban.

f. Penganggaran Biaya Program

Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan anggaran biaya pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan.

g. Partisipasi Masyarakat

Kebijakan dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders*; (2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.

h. Sistem Informasi Manajemen

Kebijakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

(SIMP) pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasis TIK; (2) Penguatan intensitas pemeliharaan sarana TIK Pendidikan; (3) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; (4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data.

i. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas manajemen SDM kependidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Manajemen SDM pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengelola kepegawaian.

j. Administrasi Sarana Perlengkapan

Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.

KESIMPULAN

1. Kondisi pendidikan dasar di Kota Dumai secara umum dalam kondisi baik tetapi ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam implementasi nya di antaranya adalah: 1) pendataan dan legalisasi tanah dan bangunan; 2) implementasi visi dan misi; 3) implementasi kurikulum; 4)

implementasi manajemen berbasis sekolah; 5) peningkatan sarana dan prasarana sekolah; 6) pemenuhan alat dan perlengkapan sekolah; dan 7) perbaikan suasana dan budaya belajar peserta didik.

2. Arah kebijakan pendidikan dasar Arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar di Kota Dumai untuk lima tahun ke depan dalam rangka mempersiapkan kawasan ekonomi khusus diarahkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan. Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan terutama pada: (1) Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi, 2002, *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bapeda Kota Dumai, 2002, *Properda Kota Dumai*.
- Bapeda Kota Dumai, 2009, *Masterplan Pendidikan Kota Dumai*.
- , 2005, *Laporan Tahunan Sosial Ekonomi Kota Dumai*, Pemda Kota Dumai.
- , 2008, *Kota Dumai Dalam Angka*, Pemda Kota Dumai.
- , 2007, *Kota Dumai Dalam Angka*, Pemda Kota Dumai.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Rencana Strategis Pendidikan*